



Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Tetap

Tak Terpangkas untuk Tangani Code

JOGJA - DPRD Kota Jogja menjamin anggaran kesehatan dan pendidikan di APBD 2011 tak akan mengalami perubahan akibat besarnya penanganan untuk membiayai antisipasi banjir lahar dingin. Kedua mata anggaran kebutuhan dasar masyarakat tersebut tetap sesuai dengan KUAPPAS. Yakni Rp 19 miliar untuk kesehatan dan Rp 32 miliar untuk pendidikan.

"Yang dikorbankan adalah biaya untuk pembangunan proyek-proyek diundur, tidak di tahun anggaran 2011 ini," tandas anggota Badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja M Syafil kemarin (13/12).

Syafil menjelaskan, khusus untuk kedua mata anggaran tersebut pihaknya memang tak ingin ada perubahan. Ini juga menjadi kesepakatan dari eksekutif. "Penanganan Code tak mengganggu anggaran kesehatan dan pendidikan. Begitu pula sebaliknya," imbuh politikus dari PKS ini.

Ia mengungkapkan, ketiga mata anggaran yang menelan angka besar ini sama-sama penting dan menyangkut kehidupan warga Kota Jogja. Karena itu, pihaknya saat ini berusaha ketiga hal tersebut

tak mengalami perubahan anggaran.

"Kami akan berusaha dengan maksimal, tak akan mengurangi nilai yang telah disepakati selama ini. Ketiga mata anggaran tersebut sama-sama prioritas untuk bisa terlaksana ditahun depan," terang Syafil.

Seperti telah diketahui, akibat banjir lahar dingin usai Merapi meletus, RAPBD Kota Jogja terancam mengalami defisit Rp 120 miliar. Biaya ini sangat besar untuk menangani ancaman banjir lahar dingin di Code yang mencapai Rp 22 miliar. Jumlah anggaran ini kian besar seiring dengan kondisi dua sungai lain yaitu Winongo dan Gajahwong yang butuh perbaikan talud dan tebing.

Untuk memperbaiki ketiga sungai tersebut, pemkot membutuhkan anggaran mencapai Rp 50 miliar. Dana ini dibutuhkan untuk memperbaiki talud dan memperkeras tebing dengan batu kali yang mengancam keselamatan warga sekitar bantaran saat terjadi hujan deras.

Anggota Banggar yang lain Zuhrif Huda menambahkan, beberapa proyek yang membutuhkan biaya besar telah mereka putuskan untuk ditunda tahun 2012. Proyek yang tertunda pembangunannya antara lain pembangunan Kecamatan Gondokusuman yang menelan anggaran Rp 3,2 miliar dan pembuatan Detail Engineering Design (DED) pembangunan RS Jogja Rp 2 miliar.

Pos lain yang mengalami penundaan adalah pembelian alat penyetrakan jalan, mobil tangga untuk perbaikan lampu *traffic light*, dan pengadaan CCTV di Malioboro dan Tugu Rp 400 juta, dan renovasi balai kota Rp Rp 3 miliar yang dipotong menjadi Rp 1,5 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Aman Yuridijaya mengakui pemkot melakukan rasionalisasi sebagai upaya mengurangi pembengkakan defisit RAPBD 2011. Rasionalisasi ini dilakukan dengan mengurangi dari segi volume bukan jumlah proyek.

"Misalnya ada proyek renovasi, pada awal dianggarkan lima unit bangunan yang direnovasi, namun sekarang dirasionalisasi menjadi tiga unit. Ini sesuai pertimbangan skala prioritas dan kebutuhan yang mendesak," terang Aman.

Meski demikian, pembangunan proyek lain yang sudah berjalan seperti Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta (PSKY) dan Terminal Giwangan tak akan mengalami perubahan. Kedua proyek tersebut dipastikan tetap berjalan dan bakal selesai sesuai jadwal. "PSKY atau XT (eks terminal) tetap selesai sesuai dengan target yaitu 2011 sudah beroperasi," katanya. (eri)

Kepada kota Yogyakarta Walikota Retardis D ten

Kepada Yth :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005